

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sudah saatnya direvisi. Di zaman modern ini, masa 4 bulan tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian, sudah tak relevan lagi. Dengan situasi dan kondisi masa kini, dan tenggang waktu tersebut selain dinilai kurang efektif dan efisien karena terlalu lama antara jarak pendaftaran dengan persidangan sehingga tidak tertutup kemungkinan pemohon lupa dengan permohonan perkara yang diajukannya, juga dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan pemohon bahkan dinilai berlebihan dalam memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Di samping itu, salah satu solusi mengurangi tumpukan perkara asas peradilan adalah sederhana, cepat dan ringan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun kurang lebih 25% dari perkara non ghaib. Dengan kata lain, jika Pengadilan telah menerapkan pemanggilan semula tenggang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE): Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi Pengadilan Agama stempat) dan Email, maka secara otomatis dapat mengurangi tumpukan perkara yang ada di

Pengadilan, sehingga lebih efektif dan efisien karena dapat mempercepat selesainya perkara.

Dalam tinjauan fiqh, Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak diketahui keberadaannya (majhul/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/hakim dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami ada uzurpun seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak ada. Jadi, tidak ada lagi tenggang waktu antara pengaduan istri dengan putusan cerai hakim. Dalam tinjauan hukum Islam, selain pendapat Malikiyyah, dalam fiqh dikenal kaidah “adh-Dhararu Yuzaalu” yang artinya: kemudharatan itu harus dihilangkan”. Di samping itu dalam ushul fiqh dikenal metode istimbath hukum “mashlahah mursalah.” Berdasarkan pendapat Malikiyyah, kaidah fiqh dan ushul fiqh tersebut, maka upaya mengefektifkan tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama dari masa 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum Islam maupun secara logika dan perkembangan teknologi informasi. Dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE): Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi Pengadilan Agama setempat) dan Email, maka panggilan akan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, tenggang waktu pemanggilan tergugat

dalam perkara ghaib perceraian ini pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

B. Saran-saran

Agar penelitian bermanfaat bagi masyarakat Muslim, Hakim, para Pegawai dan Karyawan Kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, penulis menyampaikan saran bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan payung hukum bagi peradilan dalam penggunaan teknologi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam persoalan tenggang waktu pemanggilan pihak-pihak berperkara dalam perceraian ghaib di Pengadilan Agama sebagaimana diatur sudah selayaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman, agar berjalan efektif dan efisien.